

ABSTRAKSI

Nama : Rescy Andrianingtyas
Nim : 031524153042
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tindakan Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Kendaraan Bermotor oleh Jurusita

Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan demikian menurut KUHAP, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Hal tersebut berbeda dengan konsep penyitaan yang ada dalam Hukum Pajak. Dalam Hukum Pajak, Penyitaan dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagai jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak dengan cara menjual secara lelang barang yang telah disita guna pelunasan pajak.

Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan UU PPSP bahwa penyitaan terhadap Penanggung Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak dengan tidak perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU PPSP bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut UU PPSP, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan penyitaan dan pelelangan barang Penanggung Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyitaan menurut UU PPSP dapat dikatakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelaksanaan penyitaan dalam KUHAP.

Kata Kunci : *Penyitaan, Jurusita*

ABSTRACT

Name : Rescy Andrianingtyas
Nim : 031524153042
Study Program : Jurisprudence
Title : Confiscation of the Motor Vehicle Tax Insurer by the *Bailiff*

Confiscation in the Criminal Procedure Code is a series of investigative actions to take over and / or save under the control of movable or immovable objects, tangible or intangible for the purpose of proof in investigations, prosecutions and trials. Accordingly, according to the Criminal Procedure Code, the purpose of seizure is for the purposes of "proof", especially as evidence before a court hearing. This is different from the concept of confiscation in the Tax Law. In the Tax Law, Foreclosure in the Tax Collection Law with a Forced Letter (PPSP Act) as a guarantee of repayment of the tax debt from the tax insurer by selling an auction of goods that have been confiscated for tax settlement.

From the normative juridical research and using the statutory approach and the conceptual approach, conclusions were obtained, namely based on the PPSP Law that seizure of the Motor Vehicle Tax Insurer can be carried out by the Tax Bailiff without the permission of the Head of the local District Court. This is because based on Article 7 paragraph 1 of the PPSP Law that the Forced Letter with the words "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GODS", has executorial power and the same legal position as court decisions that have permanent legal force. Therefore according to the PPSP Law, the Forced Letter is given the executorial power and the same legal position as the court's decision which has permanent legal force and cannot be appealed so that the Direct Mail can be carried out and followed up to the seizure and auction of the Tax Insurer. So that it can be concluded that in law enforcement, the implementation of confiscation according to the PPSP Law can be said to be more effective and efficient than the implementation of confiscation in the Criminal Procedure Code.

Kata Kunci : Confiscation, Bailiff